

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Nanang Martono (2019:46), pengertian kajian pustaka adalah sebagai berikut:

“Studi pustaka atau kajian pustaka atau studi literatur-literatur-*review* merupakan sebuah proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan peneliian yang akan dilakukan.”

2.1.1 *Good Corporate Governance*

Mardiasmo (2018:23) mengungkapkan bahwa “*Good Corporate Governance* adalah suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien.”

Sedangkan menurut Efrizal (2021:104) *Good Corporate Governance* adalah:

“seperangkat sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha suatu perseroan untuk memberikan nilai tambah, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar agar terciptanya suatu pola atau lingkungan kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional”.

Effendi (2016:2) mengungkapkan

“*Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem atau proses yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan dan mengendalikan keberhasilan usaha dalam perusahaan dan menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.1 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi (2016:11) terdapat 5 (lima) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan).

1. *Transparency* (transaparansi)

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

3. *Responsibility* (responsibilitas)

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. *Independency* (indenpendensi)

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan dengan baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

5. *Fairness* (kesetaraan)

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama pula.

2.1.1.2 Indikator *Good Corporate Governance*

Corporate governance dinyatakan baik apabila prosesnya memiliki transparansi atas penentuan dari sebuah tujuan, pencapaian, dan penilaian kinerjanya. Selain untuk dilaksanakan, *corporate governance* juga harus

diungkapkan dalam setiap laporan keuangan maupun tahunan untuk kepentingan setiap pemangku kepentingan. *Good corporate governance* diaplikasikan sebagai bagian yang dianggap mampu memotivasi konservatisme akuntansi. Mekanisme *good corporate governance* diprosikan dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah komisaris independen, *turnover* direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan pengawasan oleh tenaga kerja.

1. Direksi dan Komisaris

Dewan direksi (*board of director*) berfungsi untuk mengurus perusahaan sedangkan dewan komisaris (*board of commissioner*) berfungsi untuk melakukan pengawasan. Sementara itu, komisaris independen (*independent commissioner*) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*conterveiling power*) dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Peran direksi dan komiaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi GCG. Diperlukan komitmen penuh dari dewan direksi dan komiaris agar implementasi GCG dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan (Effendi, 2016:26).

2. Komite Audit dan Komite Lainnya

Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, yaitu komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite manajemen risiko, dan lain-lain. Pembentukan beberapa komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi *Good Coporate*

Governance di perusahaan. Pembentukan komite tersebut harus ditetapkan melalui suatu surat keputusan (SK) dewan komiaris (Effendi, 2016:48).

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2016:48) mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

“suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komiaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komiaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *coporate governance* di perusahaan-perusahaan”.

Tujuan pembentukan komite audit pada umumnya adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian lainnya, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi pasar.

Variabel pengungkapan *Good Coporate Governance* pada penelitian ini menggunakan Indeks pengungkapan *corporate governance* (IPCG). Indeks ini menilai implementasi *corporate governance* suatu perusahaan berdasarkan pada pengungkapan prinsip prinsip CG dalam laporan tahunannya (Surifah, 2011). IPCG dibangun berdasarkan pada asas-asas *Good Corporate Governance* menurut KNKG (2006) yang terdiri dari asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Masalah dalam pengungkapan *corporate governance* diklasifikasikan 5 kategori besar, yaitu pengungkapan keuangan, pengungkapan non-keuangan, rapat umum tahunan, waktu dan cara pengungkapan, serta praktik terbaik untuk kepatuhan terhadap

pengungkapan perusahaan. Dalam pengungkapan non-keuangan, digunakan judul-judul berbeda seperti tujuan perusahaan, struktur dan kebijakan tata kelola, anggota dewan direksi dan eksekutif, permasalahan material mengenai karyawan, pengelolaan lingkungan dan sosial, faktor risiko material yang dapat diperkirakan, dan independensi auditor (Bhuiyan dan Biswas, 2017). *Item-item* tersebut diklasifikasikan menjadi 16 *point item* yang terdiri dari pemegang saham; dewan komisaris; dewan direksi; komite audit; komite nominasi dan remunerasi; komite manajemen risiko; komite-komite lain yang dimiliki perusahaan; sekretaris perusahaan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal; manajemen risiko perusahaan; perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris; akses informasi dan data perusahaan; etika perusahaan; tanggung jawab sosial; pernyataan penerapan *good corporate governance*; dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*.

Indeks pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan dapat dihitung dengan rumus menurut Surifah (2011), Bhuiyan dan Biswas (2017), sebagai berikut:

$$\text{IPCG} = \frac{\text{Total item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Skor maksimum yang seharusnya diungkapkan}}$$

Tabel 2.1 Item Pengungkapan *Corporate Governance*

No	Klasifikasi	Item pengungkapan
1	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai hak pemegang saham 2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham 3. Tanggal pelaksanaan RUPS 4. Hasil RUPS
2	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Dewan Komisaris 2. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen). 3. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 4. Kebijakan dan jumlah remunirasi anggota Dewan Komisaris 5. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris 6. Mekanisme pengambilan keputusan 7. Program pelatihan Dewan Komisaris
3	Dewan Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Direksi dengan jabatan 2. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi 3. Latar belakang pendidikan dan karier anggota Direksi 4. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi 5. Mekanisme pengambilan wewenang 6. Mekanisme pendelegasian wewenang 7. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Direksi 8. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi 9. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi
4	Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Audit 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Audit 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit 4. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit 5. Independensi anggota Komite Audit 6. Keberadaan piagam Komite Audit
5	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi 2. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
6	Komite Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Manajemen Risiko 2. Riwayat hidup singkat anggota Komite Manajemen Risiko 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko 4. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko 5. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko
7	Komite Tata Kelola Perusahaan (GCG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite GCG 2. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite GCG 3. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite GCG 4. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite GCG 5. Independensi anggota GCG
8	Komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite 2. Uraian tugas dan tanggung jawab komite 3. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite 4. Independensi anggota komite
9	Sekretaris Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Sekretaris Perusahaan 2. Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan 3. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan
10	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang keberadaan SPI (Satuan Pengawas Internal) 2. Jumlah anggota SPI 3. Jabatan masing-masing anggota SPI 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab SPI 5. Uraian mengenai aktivitas SPI selama setahun 6. Penjelasan mengenai audit internal perusahaan
11	Manajemen Risiko Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 2. Upaya untuk mengelola risiko-risiko perusahaan
12	Perkara Penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan 2. Posisi kasus 3. Status penyelesaian perkara/gugatan 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan
13	Akses informasi dan data perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan 2. Daftar penyebaran informasi ke publik

14	Etika Perusahaan	1. Pernyataan mengenai budaya perusahaan yang dimiliki perusahaan
15	Pernyataan Penerapan GCG	1. Keberadaan prinsip-prinsip GCG 2. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan 3. Kepatuhan terhadap pedoman GCG 4. Keberadaan Board Manual 5. Struktur tata kelola perusahaan 6. Hasil penerapan GCG selama setahun 7. Audit GCG oleh eksternal auditor
16	Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan GCG	1. Visi perusahaan 2. Misi perusahaan 3. Nilai-nilai perusahaan 4. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya 5. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal 6. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan 7. Uraian mengenai etika bisnis dalam perusahaan

2.1.2 Operating Cash Flow

2.1.2.1 Laporan Arus Kas

Pengertian laporan arus kas menurut Sukamulja (2019:40) yaitu:

“Laporan arus kas merupakan laporan yang mencerminkan aliran kas di dalam perusahaan seperti arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Laporan ini memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas pada periode tertentu”.

Menurut Hery (2018:88) Laporan arus kas adalah:

“Pelaporan arus kas merupakan arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan membayar deviden”.

Dari beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan arus merupakan aliran arus kas masuk maupun keluar dalam perusahaan seperti arus

kas operasi, investasi, dan pendanaan yang memberikan informasi relevan pada periode tertentu.

Menurut Savitri (2016:75) *operating cash flow* (OCF) adalah:

“Acuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional perusahaan dapat dipakai untuk melunasi pinjaman, menjalankan kegiatan operasional perusahaan, membayar deviden, dan lain sebagainya. Jika *operating cash flow* (OCF) semakin tinggi maka akan menyebabkan arus kas di masa mendatang menjadi lebih besar sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi”.

Menurut PSAK No.2 paragraf 5 (2019) arus kas operasi adalah “aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan”.

Arus kas dari aktivitas operasi menurut Subramanyam (2017:5) adalah

“aktivitas yang berkaitan dengan laba perusahaan. Aktivitas operasi meliputi arus kas masuk neto dan arus kas keluar yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan terkait pemberian kredit kepada pelanggan, investasi pada persediaan dan memperoleh kredit dari pemasok.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Operating Cash Flow* yaitu acuan yang berkaitan dengan laba dari kegiatan operasional yang meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar dan bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Arus Kas

Tujuan laporan arus kas menurut Praswoto (2019:25) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perubahan aset bersih, struktur keuangan, dan kemampuan mempengaruhi arus kas.
2. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas.
3. Mengembangkan modal untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dan arus kas masa depan dari berbagai perusahaan.
4. Dapat menggunakan informasi arus kas historis sebagai indikator jumlah waktu dan kapasitas arus kas masa depan.
5. Meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan dan menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.

Sedangkan manfaat laporan arus kas menurut Hery (2018:86) adalah “rincian penerimaan maupun pengeluaran berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan. Informasi apapun yang ingin diketahui mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu tersaji secara ringkas lewat laporan arus kas”.

2.1.2.3 Indikator *Operating Cash Flow*

Menurut Sukamulja (2019:147) “Arus kas di klasifikasikan berdasarkan pada kegiatan arus kas operasi, arus kas investasi, dan pendanaan”. *Operating Cash Flow* (OCF) merupakan pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan *net income* selain aktivitas investasi dan keuangan, diantaranya yaitu penerimaan kas dari penjualan barang and jasa, penerimaan piutang dari konsumen, penerimaan kas dari bunga dan deviden pembayaran vunga kepada kreditor serta semua pembayaran di luar aktivitas investasi dan keuangan Harahap (2013:261).

Pada penelitian ini nilai variabel X2 diperoleh dari teori Jayanti (2016) yang merumuskan pengukuran *cash flow* dengan menggunakan *cash flow return on asset* atau *Operating Cash Flow Ratio* (OCF Ratio), yaitu:

$$\text{OCF Ratio} = \frac{\text{Arus Kas dari Aktivitas Operasi}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.3 Konservatisme Akuntansi

Savitri (2016:21) mengungkapkan bahwa “konservatisme secara mudah dapat diinterpretasikan sebagai kehati-hatian (*prudent*) dengan kehati-hatian maka kecenderungan yang ada di dalam laporan adalah *pesimisme*.”

Menurut Pamudi (2017: 94) “Konservatisme akuntansi merupakan reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian yang selalu berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan bisnis”.

Ely Suhayati dan Sri Dewi (2014: 9) mengungkapkan bahwa

“Konsep konservatisme ini didasarkan atas suatu pendapat yang menyatakan bahwa setiap pendapatan tidak boleh diakui dan dicatat sebelum pendapatan tersebut benar-benar diperoleh, tetapi semua kerugian dan beban walaupun belum terjadi asalkan sudah dapat diperhitungkan boleh dicatat dan diakui. Tujuan utama prinsip ini adalah untuk mencegah jangan sampai pendapatan bersih dicatat terlalu tinggi (*overstate*).”

Definisi konservatisme akuntansi menurut Watts (2003) “yaitu sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Konservatisme Akunansi yaitu prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan terhadap ketidakpastian dalam mengakui dan mengukur aktiva laba.

2.1.3.1 Indikator Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka semakin konservatif akuntansi yang diterapkan (Givoly dan Hayn, 2000). Terdapat beberapa cara untuk mengukur tingkat konservatisme yang pernah digunakan dalam berbagai penelitian. Watts (2003) membagi konservatisme menjadi 3 (tiga) pengukuran, yaitu:

a. *Earning/Stock Return Relation Measure*

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba tetap dilaporkan sesuai dengan waktunya. Basu (1997) menyatakan bahwa konservatisme menyebabkan kejadian – kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan). Hal ini disebabkan karena kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan harus segera diakui sehingga mengakibatkan bad news lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan good news.

b. *Earning/Accrual Measures*

Givoly dan Hayn (2000) memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi /

amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Dengan begitu, laporan laba rugi yang konservatif akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif. Depresiasi dikeluarkan dari net income dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan.

c. *Net Asset Measure*

Dalam pengukuran ini melihat pada nilai aset yang understatement dan kewajiban yang overstatement. Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000), yaitu dengan menggunakan market to book ratio yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung konservatisme akuntansi yang diukur secara akrual menurut Givoly dan Hayn (2000), yaitu:

$$\text{CONACC} = \frac{\text{NI} + \text{DEP} - \text{CF}}{\text{RTA}} \times (-1)$$

Keterangan:

CONACC = Konservatisme akuntansi yang diukur secara akrual

NI = *Net Income*

DEP = Depresiasi

CF = *Cash Flow* dari aktivitas operasi

RTA = Rata-rata total aset

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2022:95), yaitu “Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

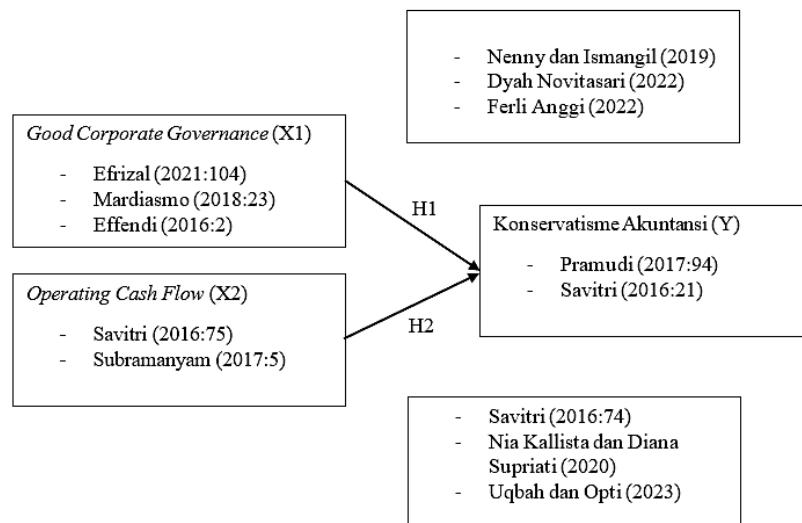
2.2.1 *Good Corporate Governance* Terhadap Konservatisme Akuntansi

Alfina (2006) menyatakan bahwa manajer akan bertindak seiring dengan bonus yang diberikan. Dengan begitu pelaporan perusahaan akan kurang konservatif dikarenakan manajemen laba yang mungkin dilakukan manajemen perusahaan demi mendapatkan bonus. Kepemilikan saham oleh publik juga dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam menerapkan konservatisme akuntansi. Jika kepemilikan saham yang dimiliki publik lebih banyak maka manajer lebih memilih melaporkan laba dengan nilai yang tinggi atau secara optimis (Savitri, 2016:70). Menurut Lara, dkk (2005) pada penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang kuat sebagai mekanisme *Good Corporate Governance* mensyaratkan tingkat

konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan komisaris yang lemah. Penelitian Wardhani (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen terhadap total jumlah komisaris maka semakin besar pula tingkat konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran pasar.

2.2.2 *Operating Cash Flow Terhadap Konservatisme Akuntansi*

Martani dan Dini (2010) dalam Khairani dan Africano (2017) mengungkapkan bahwa laporan arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk mengetahui apakah kegiatan operasional perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen ataupun melakukan investasi baru. Semakin tinggi *operating cash flow* maka semakin baik pula kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme dapat menggunakan *operating cash flow* sebagai bahan untuk memprediksi *Future Cash Flow* yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan prinsip agresifitas dalam pelaporan keuangannya. Menurut Brigita Natasya (2023) *operating cash flow* berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:99) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara atas pernyataan-pernyataan penelitian yang belum tentu kebenarannya sampai terbukti melalui data.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi

H2: *Operating Cash Flow* berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi